

PERAN BANK SENTRAL MENDORONG PEREKONOMIAN DAN JUMLAH UANG BEREDAR MELALUI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA TAHUN 2019-2023 MENURUT PERSPEKTIF SYARIAH

Rizqy Zharifah Ivanka¹, Alfia Safitri², Fitriaty Rahma³

rizqyharifah260303@gmail.com¹, alfiasafitri992@gmail.com², fitriahmah980@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini menggali lanskap keuangan Indonesia selama lima tahun terakhir, dengan fokus khusus pada strategi Bank Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji bagaimana Bank Indonesia menstimulasi perekonomian dan mengatur jumlah uang beredar melalui kebijakan keuangan, dengan mempertimbangkan perspektif Syariah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal dan buku. Analisis ini mengacu pada laporan penelitian sebelumnya dan data resmi dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Temuan menunjukkan upaya Bank Indonesia yang beragam dalam mengelola perekonomian dan jumlah uang beredar pada tahun 2019 hingga 2023. Upaya tersebut antara lain dengan memanfaatkan suku bunga BI 7DRR dan Operasi Pasar Terbuka untuk mempengaruhi perekonomian, serta menggunakan instrumen Kebijakan Makroprudensial untuk mencapai tujuannya. Dari sudut pandang Syariah, uang mempunyai arti penting dalam kegiatan ekonomi, karena dianggap sebagai berkah dari Allah yang menopang kehidupan. Dalam ekonomi syariah, instrumen kebijakan moneter diatur berdasarkan hukum syariah yang mencerminkan pertimbangan dan prinsip etis.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Perekonomian, Jumlah Uang Beredar, Kebijakan Moneter.

ABSTRACT

The inquiry delves into Indonesia's financial landscape spanning the last five years, focusing particularly on Bank Indonesia's strategies. Its core aim is to examine how Bank Indonesia stimulates the economy and regulates money supply through financial policies, considering a Sharia perspective. Employing a descriptive qualitative approach, this research relies on secondary data gathered from various sources such as journals and books. The analysis draws upon previous research reports and official data from Bank Indonesia and the Central Bureau of Statistics. Findings reveal Bank Indonesia's multifaceted efforts in managing the economy and money supply from 2019 to 2023. These efforts include utilizing the BI 7DRR interest rate and Open Market Operations to influence the economy, alongside employing Macroprudential Policy instruments to achieve its objectives. From a Sharia perspective, money holds significant importance in economic activities, as it is considered a blessing from Allah that sustains life. In Sharia economics, monetary policy instruments are governed by Sharia law, reflecting ethical considerations and principles.

Keywords: Bank Indonesia, Economy, Money Supply, Circulating, Monetary Policy.

PENDAHULUAN

Bank Indonesia (BI), seperti Bank Sentral Indonesia, berupaya menjaga sektor keuangan, sistem angsuran, dan kerangka moneter tetap stabil dan sehat. (Indonesia, 2020b). Jika ekspansi ekonomi terus berlanjut, maka sistem keuangan Bank Indonesia tidak akan bisa tetap stabil. Bagaimana dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sistem keuangan dan sistem moneter yang berhubungan dan saling terkait. Pendekatan keuangan memiliki dampak penting pada kekokohan keuangan dan di sisi lain, kekokohan moneter dapat menjadi kolom yang menopang kelangsungan hidup pendekatan keuangan. Kerangka kerja moneter adalah salah satu saluran untuk mentransmisikan pendekatan terkait uang, sehingga jika kerangka kerja terkait uang tidak stabil, pengaturan terkait uang tidak akan berhasil ditransmisikan. Di sisi lain, ketidakamanan anggaran mencakup pengaruh penting pada kekokohan kerangka anggaran karena pemborosan kapasitas sistem anggaran. (OJK, 2017).

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia harus menjaga perekonomian dan pasokan moneter Indonesia tetap stabil. Pada tahun 1997-1998, Indonesia mengalami resesi ekonomi atau moneter. Hal ini terjadi di beberapa negara Asia, antara lain Thailand dan Korea Selatan sehingga dikenal dengan istilah Krisis Mata Uang Asia. Krisis pertama terjadi pada pertengahan tahun 1997 pada nilai tukar rupee, yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi. Tahun 1998 merupakan masa yang sulit bagi Indonesia (Permana et al., 2022). Dan pada tahun ini juga, inflasi di Indonesia meningkat tajam yang awalnya berkisar rata-rata 4,7% menjadi 77,6% dan mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian, jumlah pengangguran, dan penurunan konsumsi impor dan ekspor. Perkembangan perekonomian suatu negara menunjukkan kestabilan perekonomiannya. Inflasi yang rendah dan keseimbangan jumlah uang yang beredar biasanya terjadi saat ekonomi berada dalam keadaan stabil. Hal ini tidak hanya menguntungkan dalam mengendalikan harga-harga barang dan jasa, tetapi juga dalam mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Ketika perekonomian berjalan dengan baik, pelaku usaha cenderung lebih percaya diri untuk menginvestasikan modalnya, yang pada gilirannya dapat membuka peluang baru untuk menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, kemajuan keuangan suatu negara tidak hanya mencerminkan kesehatan ekonominya, tetapi juga mempengaruhi tingkat pengangguran secara langsung (Nurjannah, Miswar, 2022). Produk Domestik Bruto (PDB) juga diantisipasi untuk menentukan peningkatan ekonomi Indonesia. PDB disimpulkan dari seluruh harga barang dagangan modal. Peningkatan dalam jumlah produk yang dibelanjakan mengarah pada perkembangan keuangan.

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, jauh sebelum itu pada tahun 1965, Indonesia pernah mengalami hiperinflasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi moneter nasional yang semakin parah, yang membuat tingkat inflasi semakin meroket sampai mencapai 592% (Amaranggana, 2021). Inflasi dapat dijelaskan sebagai peningkatan secara umum dan berkelanjutan dalam tingkat harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi (Utari, 2016), dan karena hal inilah yang membuat laju inflasi menjadi tinggi. Terdapat beberapa hal yang membuat laju inflasi menjadi tinggi hal diantaranya alam, manusia, biaya, inflasi yang terjadi sebelumnya, luar negeri (Kurniawati, 2019).

Inflasi secara umum dikatakan berbahaya, karena Inflasi mempunyai dampak negatif yang signifikan. Inflasi tidak hanya mendistorsi harga, tetapi juga mempengaruhi tabungan, investasi, dan pembangunan ekonomi. Hal ini juga melemahkan perencanaan ekonomi dan memperburuk “kerusakan” sosial dan politik. Di beberapa negara inflasi dikatakan sebagai “penyakit” karena jika suatu negara

mengalami inflasi bahkan sampai mengakibatkan krisis keuangan yang disebabkan oleh inflasi ini maka negara tersebut harus bersusah payah mencari solusinya supaya inflasi tidak semakin tinggi. Namun, inflasi juga memiliki dampak positif, dan untuk menstabilkan tingkat inflasi, pemerintah akan menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat. (Insani et al., 2023).

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Presentase (%)
1.	2019	5,02%
2.	2020	-2,07%
3.	2021	3,70%
4.	2022	5,31%
5.	2023	5,05%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 1, pertumbuhan ekonomi rata-rata terus berlanjut, namun melambat dalam beberapa tahun. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan menjadi 5,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun secara signifikan menjadi 2,07% pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial yang secara signifikan membatasi kegiatan ekonomi Indonesia. Meskipun Indonesia masih terdampak oleh pandemi pada tahun 2021, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dan mencapai 3,70%. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mencapai 5,31%, lebih tinggi dari tahun 2021 dan tertinggi sejak tahun 2013. Tingginya pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 didukung oleh peningkatan pangsa ekspor (16,28%) dan pangsa impor (14,75%) (Syaharani, 2023).

Tabel 2. Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Dalam Arti Sempit M1 (Miliar Rupiah)	Dalam Arti Luas M2 (Miliar Rupiah)
1.	2019	1.484.708	5.902.708
2.	2020	1.680.847	6.520.382
3.	2021	1.942.586	7.182.313
4.	2022	2.340.103	7.963.215
5.	2023	2.647.617	8.415.895

Sumber: Bank Indonesia, 2024

Berdasarkan Tabel 2, Bank Sentral Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,75% pada rapat yang diselenggarakan pada 16-17 Desember 2020. Tingkat bunga Fasilitas Deposit adalah 3,0%, dan tingkat bunga Fasilitas Pinjaman adalah 4,5%. Hal ini merupakan langkah untuk memastikan nilai tukar rupiah sejalan dengan aturan perekonomian dan dinamika pasar saat ini.

Selain itu, Bank Indonesia iqtisadiyyati menjadi lebih stabil dengan melakukan tindakan yang lebih halus dalam hal moneter untuk mendukung. Untuk alasan yang sama, kebijakan makroprudensial dengan fokus pada akomodasi juga telah ditingkatkan untuk memfasilitasi akses terhadap kredit dan uang, terutama untuk

sektor-sektor penting dalam perekonomian Indonesia dengan tetap menjaga stabilitas sistem perbankan. (Badan Pusat Statistika, 2024).

Kebijakan moneter diterapkan untuk mengendalikan tingkat inflasi saat ini. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas mata uang suatu negara dan stabilitas sistem keuangannya. Bank Indonesia (BI), sebagai bank sentral, melaksanakan kebijakan moneter untuk mendukung keadaan perekonomian negara, seperti mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah negara. Selain itu, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola perilaku sektor makro-keuangan, terutama sektor perbankan, yang mencerminkan hubungan erat antara stabilitas mata uang dan stabilitas sistem keuangan.

Menurut Al-Ghazali, dalam perspektif Islam, uang memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi. Uang adalah salah satu berkah dari Allah dan mendukung kehidupan di dunia ini. Di bawah hukum Islam, instrumen kebijakan moneter diatur oleh hukum Syariah. Penggunaan semua instrumen kebijakan moneter konvensional dan instrumen juga mengandung unsur riba dan suku bunga. Dengan demikian, instrumen keuangan tradisional mencakup suku bunga serta berbagai elemen bunga yang tidak dapat digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan keuangan Islam (Dini Abdianti et al., 2023).

Penulis tertarik dengan penjelasan tersebut dan ingin membahas peran bank sentral dalam mendorong perekonomian melalui kebijakan moneter dari perspektif Syariah untuk mengatasi masalah inflasi Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia dinilai sebagai bank sentral yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mampu mengatasi inflasi dalam mendorong perekonomian negara. Dan juga melihat bagaimana pandangan menurut perspektif syariah mengenai peran Bank Indonesia yang sistemnya dilakukan secara konvensional, yang pasti mengandung unsur riba dan bunga didalamnya pengolahannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh data yang mudah dipahami melalui pengumpulan, penyajian dan generalisasi informasi. Menggabungkan pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam proses penelitian memberikan beragam perspektif dan pemahaman mendalam, sehingga meningkatkan kelengkapan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data mengikuti model Miles dan Huberman. Model ini menekankan bahwa proses analisis kualitas harus diterapkan secara terus menerus dan berulang-ulang serta mencakup tahapan reduksi data, penyajian dan hasil. Dalam proses penelitian dengan berpedoman pada model ini bertujuan untuk mengkaji data secara mendalam dan menarik kesimpulan yang masuk akal. Metode ini menggunakan metode penelitian untuk menjamin reliabilitas dan validitas penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research atau suatu proses yang memanfaatkan teknik pengumpulan informasi dari jurnal, buku, situs web, dan laporan penelitian sebelumnya. Studi ini mengkaji peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian dan hubungan antara jumlah uang beredar (JUB) dan inflasi. Hal ini juga mengkaji peran yang dimainkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan pandangan Islam. Sepanjang proses penelitian, topik penelitian akan dipertimbangkan dan dipahami untuk membantu menilai kualitas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Bank Sentral Mendorong Perekonomian Melalui Kebijakan Moneter

Bank mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan nilai tukar Indonesia. Semakin tingginya inflasi merupakan sinyal bagi stabilitas perekonomian, dan inilah yang terutama menjadi atamaan Indonesia. Berikut informasi inflasi dan nilai tukar selama 5 tahun terakhir di Indonesia yaitu 2019-2023 :

Tabel 3. Inflasi di Indonesia Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Persentase
1.	2019	3,02%
2.	2020	2,03%
3.	2021	1,56%
4.	2022	4,14%
5.	2023	4,20%

Sumber : Bank Indonesia, 2024

Tabel 3 menunjukkan nilai inflasi meningkat dari 1,56% menjadi 4,20% pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Buruknya kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya kelompok berpendapatan rendah, menyebabkan tingginya inflasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter BI sangat penting dalam memerangi inflasi. Bank Indonesia BI akan menaikkan 7DRR jika inflasi naik dan jika putaran BI akan menurunkan 7DRR.

Perubahan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7DRR) dilakukan dengan berbagai mekanisme seperti suku bunga, kredit, penawaran uang, harga aset, serta perkiraan suku bunga. Penerapan BI 7DRR diharapkan dapat berdampak pada variasi suku bunga deposito antar bank. Jika inflasi terus meningkat, Bank Indonesia akan menambahkan suku bunga dan menerapkan kebijakan moneter kontraktif untuk menekan aktivitas ekonomi. Tujuan Bank Indonesia menaikkan BI 7DRR adalah untuk menahan pertumbuhan ekonomi yang berlebihan dan mengendalikan tingkat inflasi. Perubahan harga mempengaruhi banyak elemen makroekonomi defisit bunga BI 7DRR. Nilai aset seperti saham dan obligasi bisa turun, nilai individu dan perusahaan bisa turun, dan hal ini dapat menyebabkan aktivitas ekonomi seperti konsumsi dan investasi.

Tabel 4. Nilai Tukar Rupiah Indonesia Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Persentase
1.	2019	Rp 13.901,00
2.	2020	Rp 14.105,00
3.	2021	Rp. 14.269,00
4.	2022	Rp 15.731,00
5.	2023	Rp 15.426,00

Sumber : Bank Indonesia, 2024

Tabel 4 menunjukkan nilai tukar rupiah mengalami serangkaian naik turun antara tahun 2019 hingga 2023. Setelah beberapa jam, rubel mencapai titik tertingginya. Perubahan nilai tukar rupee biasanya berkaitan erat dengan nilai dolar.

Oleh karena itu, rupiah merupakan mata uang berisiko tinggi yang memerlukan pengelolaan nilai yang jujur. Bank Indonesia mengendalikan nilai tukar dengan membeli surat berharga seperti obligasi pemerintah jangka pendek dan sertifikat.

Dalam melakukan operasi pasar terbuka (OPT), Rupiah dibagi menjadi dua kategori: OPT penyerapan dan OPT injeksi. Kami melakukan pendekatan terhadap likuiditas di sistem perbankan konvensional dan syariah. Penyerapan dalam OPT dimaksudkan untuk menyerap kelebihan likuiditas untuk sementara waktu, sedangkan pada OPT, injeksi bertujuan untuk menjaga keseimbangan likuiditas dengan mendukung tercapainya tujuan pengelolaan moneter dan meningkatkan pemanfaatan likuiditas. OPT dapat dilakukan secara rutin maupun tidak teratur. OPT reguler adalah OPT yang berjalan sesuai jadwal sebagai bagian dari lelang. Sedangkan, OPT tidak teratur adalah jenis OPT yang dapat dilakukan secara sukarela setiap saat untuk mencapai tujuan kebijakan moneter. Hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan OPT normal. Bank Indonesia akan mengumumkan jadwal dan hasil lelang OPT terjadwal dan tidak terjadwal.

2. Peran Bank Indonesia Menstabilkan Jumlah Uang Beredar melalui Kebijakan Moneter

Bank sentral menggunakan pendekatan intervensionis untuk menyesuaikan jumlah uang yang dicadangkan. Mayoritas uang yang disimpan sebagai cadangan dikonversi menjadi uang tunai hingga jumlah tertentu. Di Indonesia, kebutuhan akan uang didasarkan pada kebutuhan akan uang Rupiah. Hal ini melibatkan estimasi jumlah dan jenis mata uang yang dibutuhkan untuk periode waktu tertentu atau jangka waktu tertentu. Faktor-faktor seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat akan sejumlah uang kertas menjadi pertimbangan penting ketika merencanakan jumlah uang kertas yang akan diproduksi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Selain itu, seiring meningkatnya pendapatan per kapita suatu masyarakat, maka tingkat konsumsi dalam kegiatan masyarakat juga cenderung meningkat sehingga diperlukan peningkatan jumlah uang yang didistribusikan. Tingginya keinginan konsumen masyarakat terhadap produk tertentu. Dalam hal ini, ketika keinginan konsumen terhadap suatu hal tertentu terus meningkat, otomatis harga barang tersebut pun meningkat, dan akibatnya jumlah uang beredar yang beredar pun terus meningkat, begitu pula sebaliknya. Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial dan fiskal moneter secara bersamaan.

Semua uang yang digunakan untuk perdagangan luar negeri dikenal sebagai persediaan umum. Masyarakat umumnya menggunakan mata uang yang digunakan secara aktif dan mata uang yang tidak aktif dan tidak beredar. Bank Indonesia menerbitkan dua jenis mata uang cadangan, kertas dan koin. Di sisi lain, uang giral mengacu pada berbagai bentuk uang yang beredar di dalam perekonomian, seperti saldo rekening giro di bank-bank komersial. Pada kenyataannya, Bank Indonesia menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan diskonto dan menyediakan dana melalui kebijakan moneter. Strategi Bank Indonesia untuk memonitor jumlah uang yang stabil di pasar diimplementasikan dengan memberlakukan aturan makroprudensial. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan sistem nilai tukar tetap stabil dan mencegah fluktuasi nilai tukar yang berlebihan yang dapat berdampak negatif pada perekonomian dalam skala global. Sehubungan dengan hal ini, Bank Indonesia berupaya untuk menciptakan kondisi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkembang. Dengan cara ini, Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga ketahanan seluruh sektor keuangan untuk mengurangi

risiko yang ditimbulkan oleh gejolak pasar keuangan yang dapat menyebabkan krisis ekonomi. Instrumen kebijakan makroprudensial meliputi:

1. Insentif Makroprudensial

Pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah merupakan amanah pemerintah bagi perbankan yang fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keringanan ini wajib bagi bank pemberi pinjaman atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini juga wajib bagi bank yang memenuhi atau melampaui target rasio pendanaan makroprudensial (RPIM). Paket stimulus ini diharapkan dapat memperkuat peran bank dalam intermediasi kredit, khususnya di daerah-daerah prioritas yang masih dalam proses pemulihan, seperti, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit/Pinjaman Lingkungan Hidup sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi.

2. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)

kebijakan inovatif dan mempromosikan kredit terutama kepada usaha mikro, kecil, menengah dan besar (UMKM) dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah sebuah pendekatan. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi dan memperkuat fondasi inklusi keuangan. RPIM sendiri merupakan indikator seberapa besar pangsa bank dalam keuangan inklusif. Bank diharapkan dapat mencapai tujuan RPIM ini sesuai dengan bidang keahlian dan model bisnisnya. RPIM memiliki tiga jenis pembiayaan:

- a. pembiayaan langsung dan rantai pasok
- b. pembiayaan melalui lembaga keuangan
- c. pembiayaan melalui sekuritas Pembiayaan Inklusif.

3. LTV/FTV

Merupakan adalah Rasio kredit atau pinjaman terhadap nilai berdasarkan jaminan adalah jumlah yang digunakan oleh bank manapun, baik konvensional maupun syariah, untuk menentukan jumlah kredit atau pinjaman yang diberikan sehubungan dengan nilai aset, seperti real estat, berdasarkan penilaian terakhir. Namun demikian, istilah "pagu kredit" atau "pembayaran sewa kendaraan bermotor" mengacu pada jumlah total pembayaran awal yang harus dilakukan oleh kartu debit atau nasabah, yang didasarkan pada harga kendaraan bermotor.

Hukum makroprudensial ini bersifat countercyclical, yang berarti hukum ini dimaksudkan untuk digunakan bersama dengan hukum ekonomi. Menjadikan sistem keuangan lebih stabil dan meminimalkan risiko yang berpotensi mengganggu sistem adalah tujuan dari kebijakan makroprudensial yang tepat. Selain itu, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong bank-bank untuk melakukan intermediasi keuangan yang stabil dan berkualitas tinggi, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa membahayakan stabilitas sistem mata uang.

4. CCyB

Merupakan rasio penyangga yang dipelihara oleh bank sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi kerugian yang mungkin timbul dari gagal bayar kredit atau pinjaman berisiko tinggi lainnya yang dapat merusak stabilitas sistem keuangan. Risiko ini terkait dengan karakteristik spesifik dari pemberian kredit bank, yang biasanya meningkat pada saat ekspansi ekonomi dan menurun pada saat kontraksi ekonomi. Penerapan CCyB di Indonesia sangat penting untuk mengatasi ketidakpastian prosedural ini, yang berasal dari hubungan yang erat antara kredit dan pertumbuhan ekonomi.

Cadangan kas yang harus dipertahankan oleh bank selama penurunan ekonomi diharapkan dapat digunakan selama penurunan ekonomi atau krisis. Hal ini

memungkinkan bank untuk melanjutkan intermediasi keuangan mereka tanpa mengalami kerugian. Sewa jumlah CCyB fleksibel ini bervariasi dari 0% hingga 2,5%. Setidaknya sekali setiap enam bulan, Bank Indonesia meninjau dan menyesuaikan besaran CCyB ini secara teratur, untuk memastikan kecukupan modal sesuai dengan kondisi ekonomi yang berubah-ubah.

Secara umum, Bank Indonesia secara konsisten menaikkan nilai CCyB ketika kondisi perekonomian mengindikasikan adanya ekspansi. Sebaliknya, nilai CCyB akan menurun jika perekonomian mengalami kontraksi. Bagian ini merupakan bagian penting dari peraturan permodalan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan tujuan utama untuk memperkuat ketahanan sektor perbankan terhadap fluktuasi ekonomi.

5. RIM dan RIM Syariah

Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi negara dengan menetapkan target rasio rasio intermediasi makroprudensial (RIM) dan rasio intermediasi makroprudensial resmi (RIMS) antara 84–94%. Berdasarkan pengumuman yang dibuat oleh Gubernur Bank Indonesia pada bulan Oktober 2023, kebijakan ini mulai diimplementasikan. Bank yang tidak memenuhi ketentuan RIM/RIMS akan dikenakan disinsentif dalam bentuk persyaratan giro RIM/RIMS. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong bank-bank untuk meminjamkan dan menyalurkan kredit kepada sektor korporasi, yang merupakan langkah penting dalam proses pemulihan ekonomi.

Instrumen makroprudensial seperti RIM dan RIM Syariah berfungsi untuk menyeimbangkan kapasitas bank dengan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

Tujuan dari kebijakan RIM dan RIMS adalah untuk mengakomodir penyimpangan dalam intermediasi bank, termasuk investasi yang dilakukan pada obligasi yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pengembangan fungsi intermediasi yang berkualitas tinggi dan berisiko rendah, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko dan merusak operasi perbankan yang profesional. Sebagai indikator makroprudensial, RIM dan RIMS bersifat countercyclical, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam merespon keadaan ekonomi.

6. PLM

Bank syariah dan bank konvensional mempertimbangkan jumlah minimum Rupee yang diperlukan untuk Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Syariah. Jumlah ini dikenal sebagai Cadangan Likuiditas Minimum (CIMB) atau PLM dan PLM Syariah, yang ditetapkan dalam bentuk surat berharga yang memenuhi kriteria untuk digunakan dalam operasi moneter Bank Indonesia. PLM ini terutama digunakan sebagai alat pembayaran untuk wesel bank dalam mata uang Rupiah. Fleksibilitas merupakan komponen utama dari PLM dan PLM Syariah, yang memungkinkan penggunaannya dalam transaksi rekening bank dengan Bank Indonesia selama Operasi Pasar Terbuka. Hal ini juga bergantung pada persepsi terkini dari DPK bank yang bersangkutan dalam Rupiah.

7. LJP dan PLJP Syariah

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia berperan penting sebagai Lender of Last atau LoLR. Untuk memenuhi tugas tersebut, Bank Indonesia menawarkan Fasilitas Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (TLF) dan alternatif religinya, Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) untuk membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Tujuan dari fasilitas adalah untuk memperkuat stabilitas keuangan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika bank mengalami

defisit likuiditas, di mana pengeluaran melebihi pendapatan, hal ini dapat mengganggu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban giro wajib minimum.

3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Jumlah Uang beredar

Kegiatan ekonomi adalah jenis usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan komponen penting dari populasi di setiap negara. Aktivitas ini sangat penting sebagai topik diskusi yang berfokus pada kemampuannya untuk menjadi indikator perbedaan antara tingkat pertumbuhan ekonomi periode saat ini dan tingkat pertumbuhan periode sebelumnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tahap akhir dari pertumbuhan ekonomi, dan yang paling penting adalah jumlah uang dalam populasi umum.

Aktivitas perekonomian dalam suatu negara hanya terjadi ketika mata uang negara tersebut harus meningkat lebih cepat dibandingkan harga barang. Ketika pendapatan rata-rata masyarakat meningkat, atau ketika mereka memiliki lebih banyak uang, permintaan mereka akan produk tertentu juga meningkat. Namun jika permintaan meningkat maka harga barang yang dijual di pasar akan naik, kemudian harga barang yang dijual akan turun. Berikut daftar pertumbuhan ekonomi dan arus kas tahun 2019-2023:

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Uang Beredar Tahun 2019

ertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Nilai Tukar	Kebijakan Moneter
5,02%	3,02%	Rp13.901,00	BI 7DRR
Jumlah Uang Beredar	5.902.708.000.000		Makroprudensial

Sumber : Bank Indonesia, 2019

Berdasarkan Tabel 5, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) saat ini sebesar 5,00% pada Rapat Dewan Gubernur tanggal 18-19 Desember 2019. suku bunga deposito sebesar 4,25% dan suku bunga pinjaman sebesar 5,75%. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya untuk memastikan stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta sebagai langkah antisipasi terhadap risiko global. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperbaiki dinamika ekonomi domestik dan global. Bank Indonesia menerapkan kebijakan yang tepat demi mengendalikan inflasi, stabilitas internasional, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ia juga siap bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan pengamat stabilitas ekonomi lainnya, mendukung permintaan domestik, dan meningkatkan aspirasi investasi asing yang berdampak negatif terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.(Bank Indonesia, 2019).

Tabel 6. Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Uang Beredar Tahun 2020

Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Nilai Tukar	Kebijakan Moneter
-2,07	2,03%	Rp14.105,00	BI 7DRR
Jumlah Uang Beredar	6.520.382.000.000		Nilai Tukar
			Makropredunsial
			Suku Bunga Kredit

Sumber : Bank Indonesia, 2020

Berdasarkan Tabel 6, Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam rapat yang digelar pada 16-17 Desember 2020 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 3,75%. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang diperkirakan akan bergerak sesuai standar perekonomian. Dewan Gubernur juga menetapkan tingkat suku bunga pada mekanisme simpanan sebesar 3,0% dan pada mekanisme kredit sebesar 3,0%. Saat ini, lembaga keuangan Indonesia berupaya memperkuat perekonomian negara dengan menjaga stabilitas nilai tukar.

Selain itu, Bank Indonesia telah menggunakan strategi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong akses keuangan dan kredit bagi industri bagi pemulihan ekonomi Indonesia, langkah-langkah makroprudensial yang akomodatif telah diimplementasikan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. (Bank Indonesia, 2020).

Tabel 7. Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Uang Beredar Tahun 2021

Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Nilai Tukar	Kebijakan Moneter
3,70%	1,56%	Rp14.269,00	BI 7DRR
Jumlah Uang Beredar	7.182.313.000.000		Nilai Tukar
			Suku Bunga Kredit

Sumber : Bank Indonesia, 2021

Berdasarkan Tabel 7, pada 15-16 Desember 2021, Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50% dan suku bunga deposito sebesar 3,50%. Selain itu, tingkat ke-2 ditetapkan sebesar 0,75% dan suku bunga pinjaman sebesar 4,25%. Bank Indonesia akan fokus pada kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, volatilitas nilai tukar, dan kebijakan ekonomi inklusif untuk mendukung kelanjutan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 pada Sidang Umum PBB pada 24 November 2021. Selain itu, Bank Indonesia berkomitmen meningkatkan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK). Perubahan ini akan membantu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara (Bank Indonesia, 2021).

Tabel 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Uang Beredar Tahun 2022

Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Nilai Tukar	Kebijakan Moneter
5,13%	4,14%	Rp15.731,00	BI 7DRR
Jumlah Uang Beredar	7.963.215.000.000		Nilai Tukar
			Surat Berharga
			Makroprudensial

Sumber : Bank Indonesia, 2022

Seperti terlihat pada Tabel 8, pada Rapat Dewan Gubernur tanggal 21-22 Desember 2022, Bank Indonesia memutuskan untuk menerapkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) dan menaikannya menjadi 5,50%; suku bunga deposito meningkat sebesar 25 bps sehingga meningkat menjadi 4,75%; dan suku bunga kredit meningkat sebesar 25 bps menjadi 6,25% dalam jangka pendek. Strategi ini untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, terutama untuk

melacak inflasi yang didorong oleh impor. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing melalui operasi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF), serta meningkatkan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Pembelian dan penjualan SBN juga dibatasi oleh peraturan ini (Bank Indonesia, 2020).

Tabel 9. Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Uang Beredar Tahun 2023

Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Nilai Tukar	Kebijakan Moneter
5,05%	4,20%	Rp15.426,00	BI 7DRR
Jumlah Uang Beredar	8.415.895.000.000		Nilai Tukar
			Surat Berharga
			Makropredensial
			Surat Bunga Dasar Kredit

Sumber : Bank Indonesia, 2023

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 9, Bank Indonesia, sebagai bagian dari reformasi makroprudensial, kebijakan keuangan, dan sistem pembayaran, pada Rapat Dewan Gubernur tanggal 20, 21 Desember 2023, BI-rate menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility menjadi 5,25% dan Fasilitas Kredit berencana menaikkan suku bunga menjadi 6,75%. untuk menjamin stabilitas ekonomi dan mengurangi siklus pertumbuhan ekonomi. Beberapa teknik yang digunakan untuk intervensi valuta asing antara lain perdagangan spot, penetapan nilai rupee menggunakan domestic non distributeable forward (DNDF) dan pemasaran ulang Surat Berharga Negara. Selain itu, teknik pengelolaan uang yang berorientasi pasar seperti Surat Berharga Bank Indonesia, Surat Berharga Devisa Bank Indonesia, dan Surat Berharga Bank Indonesia juga penting untuk pengelolaan uang yang lebih efektif (Bank Indonesia, 2023).

KESIMPULAN

Hasil dan pembahasan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Dengan menggunakan satuan yang disebut suku bunga acuan dan BI-7DRR (Daily Repo Rate), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan keuangan untuk menjamin stabilitas perekonomian. Pasar terbuka secara aktif menukarkan dolar dan euro. (2) Kebijakan moneter Bank Indonesia yang meliputi Last Resort loan, countercyclical buffers (CCB), credit-to-value atau financial-to-value, buffer likuiditas, rasio intermediasi makroprudensial, likuiditas jangka pendek, dan penetapan permintaan dan penawaran Uang. (3) Faktor yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan arus kas yaitu korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan arus kas adalah tingkat perekonomian, jumlah uang yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajuna, L. H. (2017). Kebijakan Moneter Syariah. Jurnal Al-Buhuts, Volume. 13, 109–115.
 Amaranggana, C. M. (2021). Kilas Balik Indonesia Atasi Inflasi 500% di Tahun 1966. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/617a81c14c0e791c3760bbcf/Kilas-Balik-Indonesia-Atasi-Inflasi-0,1-Persen-di-Tahun-1966>

- Badan Pusat Statistika. (2024). Uang Beredar (Miliar Rupiah), 2023. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIzIzI=/uang-beredar.html>
- Dini Abdianti, Anisa Restu, & Sholahuddin Al Ayyubi. (2023). Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan*, 1(2), 106–120. <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i2.20>
- Handayani, M., Talbani Farliani, Riski Fandika, & Indah Islami. (2021). Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 171–182. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4515>
- Indonesia, B. (2019). BI 7-DAY REVERSE REPO RATE TETAP 5,00% MENDORONG MOMENTUM PERTUMBUHAN, MEMPERTAHANKAN STABILITAS. *Siaran Pers. Bank Indonesia*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_218819.aspx
- Indonesia, B. (2020a). BI 7-DAY REVERSE REPO RATE TETAP 3,75%: BERSINERGI MEMBANGUN OPTIMISME PEMULIHAN EKONOMI. *Siaran Pers. Bank Indonesia*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_229520.aspx
- Indonesia, B. (2020b). Fungsi Utama Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/default.aspx>
- Indonesia, B. (2020c). Inflasi. *Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>
- Indonesia, B. (2020d). Sejarah BI. *Bank Indonesia*. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/default.aspx>
- Indonesia, B. (2021). BI 7-DAY REVERSE REPO RATE TETAP 3,50%: SINERGI MENJAGA STABILITAS DAN MEMPERKUAT PEMULIHAN. *Bank Indonesia*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2333221.aspx
- Indonesia, B. (2023). BI-RATE TETAP 6,00%: SINERGI MENJAGA STABILITAS DAN MENDORONG PERTUMBUHAN. *Bank Indonesia*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2534223.aspx
- Insani, F., Yuni, I. D., & Harahap, I. (2023). Kebijakan Moneter Dalam Mengendalikan Inflasi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 1106–1115.
- Ismail, M. (2006). Inflation Targeting dan Tantangan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia*, Volume 2, 121.
- Kurniawati, F. (2019). Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1252>
- Manurung, M. P. R. (2008). Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter. LPFEU.
- Marselino Wau, Leni Wati, J. F. F. (2021). TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI (KAJIAN KONSEPTUAL DAN EMPIRIK) (E. M. Aksara (ed.)).
- Nurjannah, Miswar, N. (2022). ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP INFLASI DAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 6 No., 80.
- OJK. (2017). Peran Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Peran-Bank-Indonesia.aspx>
- Permana, Y. H., Nur'aeni, N., & Setiawan, S. (2022). Peran Bank Indonesia dalam Menstabilkan Perekonomian dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter. *Jurnal Dimamu*, 1(2), 231–240. <https://doi.org/10.32627/dimamu.v1i2.482>
- Putra, D. A. (2016). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kota-Kabupaten Dan Indek Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis, D A N Brawijaya, Universitas*, 16.
- Salim, J. F. (2017). PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal E-KOMBIS*, Volume III, 70.
- Solikin, P. W. (2003). Kebijakan Moneter di Indonesia. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

- Syahrani, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam 10 Tahun Terakhir. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/melasyhrn/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dalam-10-tahun-terakhir-fivcl>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 13. (1968). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. 2, 1-27.
- Utari, G. A. D. (2016). INFLASI DI INDONESIA : KARAKTERISTIK DAN PENGENDALIANNYA. Bank Indonesia Istitute.